PERGULATAN PERUMUSAN BERMAZHAB SECARA QAWLĪ DAN MANHAJĪ DALAM BAḤṬH AL-MASĀ'IL PADA MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA KE-33

Achmad Kemal Riza

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

E-mail: kemalespe@yahoo.com

Abstract: *Baḥṭh al-masā'il* is a forum in which traditionalist Muslims of Nahdlatul Ulama get their fatwas. Nahdlatul Ulama practices *taqlīd* and therefore *madhhab* in its fatwa by relying upon opinions of especially Shāfi'ī jurists. Since 1992, some forward-minded people within Nahdlatul Ulama introduced the use of *madhhab manhajī* through *istinbāṭ* method in addition of *madhhab qawli*. However, the co-existence of these two methods creates everlasting polarization within Nahdlatul Ulama. There once division of application, though, in which *manhajī* was employed in *mandū'iyyah* cases and *qawli* was practiced in *waqi'iyyah* cases, but it did not last long. The National Congress of Nahdlatul Ulama in 2015, when *istinbāṭ* of *madhhab manhajī* was discussed once again, unveiled fierce debates between supporters of the two methods. The East Java Branch of Nahdlatul Ulama, which are fervent supporters of *qawli*, insists on its sole employment in fatwa. All their *baḥṭh al-masā'il waqi'iyyahs* after the 2015 Congress use *qawli*. However, *manhajī* start to appear in their *baḥṭh al-masā'il mandū'iyyah*, especially in cases where various approaches should be deployed, such as fatwa on Islam Nusantara.

Keywords: *Baḥṭh al-masā'il*; fatwa method; Nahdlatul Ulama.

Pendahuluan

Nahdlatul Ulama (NU) adalah satu dari beberapa lembaga *iftā'* yang ada di Indonesia. Sebagai sebuah organisasi keislaman yang mewadahi Muslim tradisional, metode *iftā'* yang dipakai pada dasarnya adalah metode mazhab *qawli* (*taqlīd*), khususnya mazhab Shāfi'ī. Akan tetapi, metode mazhab *qawli* Shāfi'ī ini diterima kritikan yang gencar baik secara internal ataupun eksternal. Secara

umum, kritikan ini dilandaskan pada tiga hal yang saling berkaitan; perlunya mengadopsi metode ijtihad/istinbat (*manhaj*) karena keterbatasan epistemologis yang dimiliki oleh metode mazhab *qawli*; perlunya meningkatkan relevansi fatwa yang dihasilkan yang selama ini sering kali tidak aplikatif; dan perlunya memperluas produk-produk *baḥṡ al-masā'il*. Kritikan ini pada akhirnya memecah kalangan internal NU. Sebagian masih setia dengan pendekatan mazhab *qawli*, dan sebagian yang lain berusaha menerapkan metode ijtihad.

Perdebatan dua kelompok ini terefleksikan dalam beberapa hasil *baḥṡ al-masā'il* terkait metode *iftā'* di lingkungan NU semenjak era akhir 1980an, dan terus terjadi setiap kali terjadi forum *baḥṡ al-masā'il* yang diselenggarakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), sampai Mukhtar terakhir tahun 2015 yang lalu. Dari perdebatan-perdebatan yang mengemuka dan hasil-hasil *baḥṡ al-masā'il* terkait metode *iftā'* NU, nampaknya belum ada titik temu yang memuaskan, karena masing-masing bersikeras pada pandangan masing-masing. Hal ini nampak jelas dalam proses berjalannya *baḥṡ al-masā'il mawḍū'iyah* dalam Mukhtar tersebut terutama dalam pembahasan metode istinbat.

Tulisan ini hendak menunjukkan bahwa *baḥṡ al-masā'il* NU merupakan lembaga *iftā'*, dan perkembangan metode *iftā'* di lingkungan NU semenjak kelahirannya di tahun 1926 sampai dengan Mukhtar terakhir NU tiga tahun yang lalu. Sebuah sub-bahasan akan disediakan untuk menunjukkan bahwa metode *manhaj* (istinbat) belum menjadi metode yang diterapkan secara luas dalam *baḥṡ al-masā'il* NU meskipun sudah disahkan pada Mukhtar ke-33 lalu. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, yang merupakan salah satu basis utama NU, termasuk pihak di kalangan internal NU yang bersikukuh menggunakan metode mazhab *qawli* dalam *baḥṡ al-masā'il*. Hal ini terbukti dalam semua *baḥṡ al-masā'il* yang mereka laksanakan, baik sebelum atau setelah Mukhtar ke-33. Semua *baḥṡ al-masā'il wāq'i'iyah* yang dilakukan PWNU Jawa Timur menggunakan metode mazhab *qawli*, dan hampir semua *baḥṡ al-masā'il mawḍū'iyah*-nya juga menerapkan metode tersebut dengan pengecualian. Pengecualian dilakukan dalam permasalahan yang membutuhkan berbagai pendekatan yang tidak hanya pendekatan *fiqhīyah*, misalnya permasalahan Islam Nusantara yang akan dijelaskan kemudian.

Telah banyak karya dan penelitian yang membahas tentang *baḥṡ al-masā'il* dari berbagai dimensi dan sudut pandang. Ada beberapa karya yang patut disebutkan. Yang pertama adalah kumpulan tulisan (alm.) K.H. MA. Sahal Mahfudh, Rais Am PBNU selama tiga periode, yang berjudul *Nuansa Fiqih Sosial*. Beberapa bab buku ini, meskipun secara terbatas, memberikan ulasan atas urgensi penerapan metode ijtihad dalam *baḥṡ al-masā'il* NU.¹ Selanjutnya, diskusi ini diteruskan oleh beberapa ulama fiqh muda NU. Sebuah karya kumpulan tulisan yang disunting oleh M. Imdadun Rahmat mencoba menggali lebih lanjut bentuk-bentuk transformasi paradigma *baḥṡ al-masā'il* NU. Menariknya, K.H. MA. Sahal Mahfudh pun turut menuliskan kata pengantarnya.²

Dari kalangan akademisi, disertasi Ahmad Zahro membahas *baḥṡ al-masā'il* semenjak 1926 sampai 1999 dari perspektif metode dan analisis beberapa hasilnya.³ Selain itu, Imam Yahya berusaha mengkaji hasil-hasil *baḥṡ al-masā'il* NU pascaputusan Munas Lampung 1992 sampai 1997, dengan kesimpulan bahwa sebagian besar pembahasan masih menggunakan metode mazhab *qawli*.⁴ Selanjutnya, Ahmad Arifi menulis tentang bagaimana fiqh yang dikembangkan oleh NU dapat merespons perubahan sosial. Ia menunjukkan munculnya polarisasi dalam kalangan NU dalam bentuk *taqlid* dan *tajdid*.⁵ Selain itu, Abdul Mughits juga menulis tesis tentang fiqh pesantren yang merupakan basis intelektual NU. Ia mengkhususkan pembahasannya terhadap tiga pesantren di Jawa Timur yang dianggapnya sebagai penghasil mufti di kalangan NU, yaitu Pesantren Lirboyo dan Pesantren Ploso di Kediri, serta Ma'had Aly di Situbondo. Ia berkesimpulan bahwa baik fiqh ataupun usul fiqh dipelajari secara memadai dalam pesantren, meskipun dominasi fiqh tetap terjaga, khususnya di Pesantren

¹ MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial* (Yogyakarta: LKiS, 1994).

² Rahmat, M. Imdadun (ed), *Kritik Nalar Fiqih NU: Transformasi Paradigma Baḥṡul Masail* (Jakarta: Lakpesdam, 2002).

³ Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Baḥṡul Masa'il 1926-1999* (Yogyakarta, LKiS, 2004).

⁴ Imam Yahya, *Pergeseran Ijtihad dalam Baḥṡul Masail NU* (Semarang: Walisongo Press, 2009).

⁵ Ahmad Arifi, *Pergulatan Pemikiran Fiqih "Tradisi" Pola Mazhab* (Sleman: eLSAQ Press, 2010).

Lirboyo dan Ploso. Sedangkan Ma'had Aly di Pesantren Salafiyah Shāfi'iyah menun-jukkan fenomena kabalikannya.⁶

Beberapa penulis lain juga mencoba mengkaji metode *baḥṡ al-masā'il* NU, tetapi sebagai bagian dari diskusi yang lebih luas. Misalnya, Rifyal Ka'bah mencoba membandingkan metode istinbat hukum Muhammadiyah dan NU.⁷ Demikian pula MB. Hooker, yang mencoba melacak peran fatwa hukum Islam di Indonesia dalam perubahan sosial. Di dalamnya, ia membahas fatwa-fatwa Muhammadiyah, NU dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan menyoroti beberapa produk fatwa masing-masing.⁸ Terakhir, Pradana Boy Zulian mengulas fatwa Indonesia pascareformasi terkait topik-topik pluralisme dan sektarisme.⁹ Beberapa artikel berkala ilmiah juga membahas metode *baḥṡ al-masā'il* NU, misalnya sebuah yang secara spesifik menelaah dinamika penerapan metode *baḥṡ al-masā'il* NU Kabupaten Jombang.¹⁰ Selain itu, Nadirsyah Hosen juga menyoroti pola ijtihad *jama'i* yang dilakukan dalam bahtsul *masā'il* NU.¹¹ Demikian pula artikel Vivian Baharu Sururi yang menceritakan perkembangan metode *baḥṡ al-masā'il* dari awal kemunculannya di tahun 1926 sampai keputusan Munas Lampung 1992. Dia juga menceritakan dinamika pasca Munas Lampung dimana terjadi diskusi yang cukup keras antara kelompok konservatif dan kelompok liberal dalam memahami metode *baḥṡ al-masā'il*.¹²

⁶ Abdul Mughits, *Kritik Nalar Fikih Pesantren* (Jakarta: Kencana, 2008)

⁷ Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia: Perspektif Muhammadiyah dan NU* (Jakarta: Universitas Yarsi, 1999).

⁸ MB. Hooker, *Indonesian Islam: Social Change through Contemporary Fatawa* (Crows Nest: ASAA, 2003).

⁹ Pradana Boy Zulian, *Fatwa in Indonesia: An Analysis of Dominant Legal Ideas and Mode of Thought of Fatwa-Making Agencies and Their Implications in the Post-New Order Period* (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2018).

¹⁰ Achmad Kemal Riza, "Contemporary Fatawa of Nahdlatul Ulama: Between observing the Maddhhab and Adapting the Context", *Journal of Indonesia Islam*, Vol. 5, No. 1 (Juni 2011).

¹¹ Nadirsyah Hosen, "Nahdlatul Ulama and Collective Ijtihad", *New Zealand Journal of Asian Studies*, Vol. 6, No. 1 (Juni 2004).

¹² Vivin Baharu Sururi, "Metode Istiḥbat Hukum di Lembaga Bahsul Masail NU", *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 6, No. 3 (2013), 421-454.

Sekilas *Bahth al-Masā'il* Nahdlatul Ulama

Dalam praktiknya, NU merupakan institusi di mana para ulama di dalamnya sebagai pribadi seringkali dijadikan rujukan bagi masyarakat yang mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan permasalahan keagamaan. Dengan kata lain, NU juga berperan sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa.²⁹ Sebagai sebuah lembaga *iftā'*, alur perumusan fatwa diawali dengan munculnya pertanyaan dari masyarakat (khususnya yang berafiliasi kepada NU) kepada kiai atau pengurus NU setempat. Urusan selesai jika pertanyaan tersebut bisa dijawab dalam tahap ini. Akan tetapi, jika belum mendapatkan jawaban, maka akan diagendakan *bahth al-masā'il* di tingkat Cabang NU. Bila masih belum mendapat jawaban juga, maka akan diangkat dalam *bahth al-masā'il* di tingkat Wilayah (Provinsi). Jika belum tuntas, maka akan disampaikan ke PBNU untuk dibahas bersama pertanyaan-pertanyaan lainnya. PBNU kemudian menunjuk para ulama untuk mempelajari dan menyiapkan jawabannya dan mengagendakan pembahasan dalam muktamar, munas ataupun konbes NU.³⁰

Dalam merespons pertanyaan terkait isu-isu hukum Islam yang diajukan oleh anggotanya, para ahli fiqh dalam lingkungan NU melakukan pertemuan secara periodik untuk menjawab pertanyaan tersebut secara kolektif.³¹ Pertemuan ini disebut dengan istilah *bahth al-masā'il*,³² di mana pertanyaan hukum Islam dijawab dengan

²⁹ Banyak tulisan yang menegaskan hal ini, misalnya Hooker, *Indonesian Islam*; dan Zulian, *Fatwa in Indonesia*.

³⁰ Zahro, *Tradisi Intelektual NU*, 78. Lihat juga Ahmad Munjin Nasih, "Bahtsul Masail dan Problematikanya di Kalangan Masyarakat Muslim Tradisional", *Al-Qānūn: Jurnal Pembaruan dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 12, No. 1 (Juni 2009), 108.

³¹ Dalam *bahth al-masā'il* NU, para ulama membahas masalah yang ditanyakan secara *jama'i* (kolektif) dan merumuskan jawaban atas nama lembaga *bahth al-masā'il*, bukan atas nama pribadi meskipun di akhir rumusan jawaban bahtsul masail dilampirkan nama-nama ulama yang turut merumuskan jawaban tersebut. Lihat Tim Penyelarar LTN NU (ed.), *Abkām al-Fuqahā': Solusi Problematika Aktual Hukum Islam (Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-2010)* (Surabaya: Khalista dan LTN PBNU, 2011), 482.

³² Menurut pelacakan Nadirsyah Hosen, setelah NU mengadakan *bahth al-masā'il*, maka pemasalahan hukum yang muncul tidak lagi dimintakan jawaban ke ulama di Hijāz. Lihat Nadirsyah Hosen, "Nahdlatul Ulama and Collective Ijtihad", 9.

merujuk pada opini-opini ulama mazhab yang berserak dalam buku-buku yurisprudensi Islam, khususnya mazhab Shāfiʿi.³³

Secara resmi, *baḥṡ al-masā'il* pertama kali diselenggarakan dalam Mukhtar pertama NU pada tanggal 21 Oktober 1926 di Surabaya. Hal ini berarti bahwa usia *baḥṡ al-masā'il* hampir sama tuanya dengan NU sendiri yang didirikan tanggal 30 Januari 1926 di kota yang sama.³⁴ *Baḥṡ al-masā'il* menjadi bagian penting dalam kegiatan-kegiatan besar yang dilakukan oleh NU, baik di tingkat Musyawarah Wakil Cabang (MWCNU) di tingkat kecamatan, Pengurus Cabang (PCNU) di tingkat kabupaten/kota, Pengurus Wilayah (PWNU) di tingkat provinsi, sampai dengan Pengurus Besar (PBNU) di tingkat nasional. *Baḥṡ al-masā'il* dapat dilakukan secara terpisah dari kegiatan NU lainnya, ataupun sebagai salah satu agenda dalam Konferensi, Musyawarah, atau Mukhtar NU. Agar kegiatan *baḥṡ al-masā'il* ini lebih rapi, PBNU membentuk Lajnah Baḥṡul Masail Diniyah, dengan SK PBNU Nomor 30/A.I.05/5/1990 yang kemudian ditingkatkan menjadi “lembaga”, sehingga bernama Lembaga Baḥṡul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU). Menurut pasal 18 Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama No. II/MNU-32/III/2010, LBMNU bertugas membahas masalah-masalah *maḥḍū'iyah* (tematik) dan *wāqī'iyah* (aktual) yang akan menjadi Keputusan PBNU.³⁵

Sekilas Metode *Iftā' Baḥṡ al-Masā'il*

Sebagai pihak yang berkomitmen terhadap mazhab, NU pada dasarnya menganut *taqlid*.³⁶ *Taqlid* yang dianut oleh NU ini adalah sebuah pilihan sadar dan strategis untuk melestarikan otoritas mazhab.³⁷ *Taqlid* memang dapat dipahami sebagai kerangka metodologis, meskipun dapat juga dipandang sebagai sebuah

³³ Awalnya, *baḥṡ al-masā'il* diselenggarakan di pesantren. Sebagai sebuah forum diskusi di kalangan santri sebagai bentuk pendidikan calon mufti. Jadi, *baḥṡ al-masā'il* sudah ada sebelum NU didirikan di tahun 1926, lihat MA. Sahal Mahfudh, *Baḥṡul Masail dan Istinbath Hukum NU* (t.t.: t.tp., t.th.), vi-vii; lihat juga Zulian, *Fatwa in Indonesia*, 12.

³⁴ Tim Penyelaras LTN NU (ed.), *Aḥkām al-Fuqahā'*, 1.

³⁵ Keputusan No. II/MNU-32/III/2010 Pasal 18 Tentang Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama.

³⁶ Muneer, Fareed, “Against Ijtihad”, *The Muslim World*, Vol. 91, No. 3/4 (2001).

³⁷ Ahmad Imam Mawardi, ‘Sisi Positif Taqlid dalam Perkembangan Hukum Islam’, *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5, No. 2 (Maret 2011), 251.

bentuk keterkungkungan intelektual.³⁸ Dengan demikian, metode penjawaban masalah NU adalah dengan menggunakan pendapat-pendapat ulama yang terdapat dalam mazhab-mazhab fiqh Sunnī yang sudah terhimpun (*mudawwan*); Ḥanafī, Mālikī, Shāfi‘ī dan Ḥanbalī. Bahkan, menurut fatwa perdana NU tahun 1926 ini, dinyatakan bahwa metode mazhab ini adalah satu-satunya cara dalam menjalankan hukum Islam saat ini.³⁹ Karena NU adalah penganut mazhab Shāfi‘ī, maka pandangan ulama Shāfi‘īyah menjadi prioritas, dengan urutan sebagai berikut: (1) pendapat yang disepakati al-Rāfi‘ī dan al-Nawawī, (2) pendapat al-Nawawī, (3) pendapat al-Rāfi‘ī, (4) pendapat kebanyakan ulama, (5) pendapat ulama terpandai, dan (6) pendapat ulama paling *wira’*.⁴⁰ Aturan penggunaan mazhab Shāfi‘ī ini nampaknya tidak mutlak, mengingat *talfiq* (berfatwa dan mengamalkan pendapat mazhab Sunnī lainnya) juga terjadi dalam fatwa-fatwa NU.⁴¹

Berikut ini contoh hasil *baḥth al-masā’il* NU yang dihasilkan pada Mukhtamar ke-23 di Surakarta tahun 1962, tentang hukum alkohol:

1. Pertanyaan

Bagaimana hukumnya benda cair yang dinamakan alkohol? Najiskah atau tidak? Kalau najis, maka bagaimana hukumnya minyak wangi yang dicampur dengan alkohol, apakah dimaafkan untuk salat atau tidak? Kalau dimaafkan, apakah memang dimaafkan secara mutlak atau dengan syarat telah hancur? Kami mengetahui campuran minyak wangi itu terdiri dari 1.000 gram alkohol dan 50 gram wewangian (NU Cab. Senori Tuban).

2. Putusan

Bahwa alkohol itu termasuk benda yang menjadi perselisihan hukumnya di antara para ulama. Dikatakan bahwa alkohol itu najis, sebab memabukkan, dan juga dikatakan bahwa alkohol

³⁸ Nafiul Lubab dan Novita Pancaningrum, *Mazhab: Keterkungkungan Intelektual atau Kerangka Metodologis (Dinamika Hukum Islam)*, *Yustisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 6, No. 2 (Desember 2015), 407-408.

³⁹ Tim Penyelaras LTN NU (ed), *Aḥkām al-Fuqahā’*, 2.

⁴⁰ *Ibid.*, 3-4.

⁴¹ Menurut penelitian Zahro, secara *de facto*, *talfiq* memang dilakukan dalam *baḥth al-masā’il* NU, dan secara *de jure* juga dibenarkan. Lihat Zahro, *Tradisi Intelektual NU*, 138-141.

itu tidak najis, sebab tidak memabukkan, bahkan mematikan seperti racun. Sementara Mukhtamar berpendapat najis hukumnya, karena alkohol itu menjadi arak. Adapun minyak wangi yang dicampuri alkohol, kalau campurannya hanya sekadar menjaga kebaikannya, maka dimaafkan. Begitupun halnya obat-obatan.

3. Keterangan

فِي تَعْرِيفِ الْكُحُولِ. وَكَانُوا يُسَمُّونَهُ رُوحَ الْعَرَقِ وَالْعَرَقُ يُسَمُّونَهُ رُوحَ الْخَمْرِ. ثُمَّ تَرَأَتْ الصَّنَاعَةَ فِيهِ فَصَارُوا يُخْرِجُونَهُ مِنْ كُلِّ مَا يَقْبَلُ التَّخْمَرُ بِذَاتِهِ أَوْ بِالتَّخْمِيرِ بِالْمَاءِ.

Radd al-Fudūl fī Mas'alat al-Khamr wa al-Kuḥūl, tidak ditemukan *marāji'*-nya.

الْمِخْتِ الثَّالِثُ فِي تَعْرِيفِ الْكُحُولِ الَّذِي اسْتَفَدْنَاهُ مِنْ كَلَامِ مَنْ يَعْرِفُ حَقِيقَتَهُ الَّذِي يَقْبَلُهُ الْحِسُّ مَعَ مَا رَأَيْنَاهُ مِنْ آلَاتِ صِنَاعَتِهِ. وَهُوَ غُنْصَرٌ مُجَارِيٌّ يُوجَدُ فِي الْمَتَخَمَّرَاتِ الْمُسْكِرَاتِ مِنَ الْأَشْرِبَةِ، فَبِوُجُودِهِ فِيهَا يَحْصُلُ الْإِسْكَارُ، وَيُوجَدُ هَذَا الْكُحُولُ أَيْضًا فِي غَيْرِ الْأَشْرِبَةِ مِنْ مَتَخَمَّرَاتٍ تَقْبَعُ نَحْوَ الْأَزْهَارِ وَالْأَثْمَارِ الَّذِي يُتَّخَذُ طَبِيبًا وَغَيْرُهُ كَمَا يُوجَدُ مِنْ مَوْفُودِ الْحَشَبِ بِآلَاتِ حَدِيدِيَّةٍ مَخْصُوصَةٍ، وَهَذَا الْأَخِيرُ أَضْعَفُ الْكُحُولِ كَمَا أَنَّ أَقْوَاهُ الَّذِي يُوجَدُ فِي خَمْرِ الْعِنَبِ.

Sayyid 'Uthmān al-Batawī, *al-Mabāḥith al-Wāfiyah fī Ḥukm al-Aṭhar al-Afranjiyah*, 6.

وَمِنْهَا الْمَائِعَاتُ النَّجَسَةُ الَّتِي تُصَافُ إِلَى الْأَدْوِيَةِ وَالرَّوَاحِ الْعَطْرِیَّةِ لِإِصْلَاحِهَا. فَإِنَّهُ يُعْفَى عَنِ الْقَدْرِ الَّذِي بِهِ الْإِصْلَاحُ

'Abd al-Raḥmān al-Jazirī, *al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1417 H/1996 M), Vol 1, 22.

Fatwa tersebut terdiri dari tiga bagian; pertanyaan, jawaban, dan referensi. Pertanyaan diajukan oleh *mustafti* yang biasanya ditunjukkan dengan pencantuman nama kota asal *mustafti* (penanya) tersebut. Pertanyaan ini dijawab dengan singkat, menunjukkan status hukumnya dan seringkali tanpa disertai dengan alasan-alasan hukum. Di bagian akhir disampaikan rujukan dari beberapa kitab fiqh mazhab Shāfi'ī. Bila ditinjau dari metode yang disampaikan oleh Ibn Ṣalāḥ, maka bermazhab secara *qanlī* seperti ini disebut dengan prosedur *naql* (mengutip).

Dalam praktik yang terjadi dalam fatwa-fatwa NU, memang pola mazhab *qawli* inilah yang dominan digunakan ketika menjawab pertanyaan. Akan tetapi, beberapa pengecualian terjadi yang nampaknya disebabkan tidak ditemukannya pandangan fiqh dalam kitab-kitab fiqh mengenai masalah yang ditanyakan. Dalam beberapa fatwa, ada rujukan kepada kitab fiqh mazhab Sunnī lainnya (*talfiq*), rujukan langsung terhadap ayat-ayat al-Qurʾān ataupun ḥadīth nabi (bukan kepada tafsir atau *sharḥ ḥadīth*) yang mengindikasikan bahwa ini adalah sebuah bentuk ijtihad, atau *takhrīj uṣūlī* menurut terminology Ibn Ṣalāḥ. Dalam kesempatan lain, juga ada ada bentuk jawaban dengan menyamakan permasalahan yang sedang dibahas dengan masalah yang memiliki kemiripan dengan pandangan ulama mazhab (*ilhāq*).⁴²

Ada beberapa kemungkinan alasan di balik kelenturan metodologis ini. Kemungkinan pertama adalah kesulitan yang dialami dalam mencari redaksi fiqh yang sesuai untuk menjawab pertanyaan. Aspek ini juga diakui oleh beberapa ulama yang terlibat dalam *baḥṡ al-masāʾil*.⁴³ Kemungkinan lainnya adalah adanya kesulitan dan ke-*mudarat*-an dalam menerapkan jawaban yang persis dengan redaksi yang tercantum dalam kitab fiqh. Sehingga perlu dicarikan alternatif jawaban dengan metode lain.

Putusan Munas Lampung Tahun 1992: Penerapan dan Penolakannya

Pertimbangan-pertimbangan terakhir inilah, ditambah dengan kemunculan banyak tokoh dengan gagasan perbaikan di era 1980an seperti K.H. MA. Sahal Mahfudh, K.H. A. Mustofa Bisri, KH. Abdurrahman Wahid, dan Masdar F. Masʿudi,⁴⁴ memunculkan diskusi-diskusi internal NU seputar metode fatwa *baḥṡ al-masāʾil* yang berujung pada terbitnya dokumen yang berjudul *Sistem*

⁴² Dalam bukunya, Ahmad Zahro menghitung bahwa persentase penggunaan pola mazhab *qawli* dalam fatwa-fatwa NU antara tahun 1926–2000 berkisar 84,6%, *ilhāqī* 7,7%, dan *manḥajī* sekitar 1,9%.

⁴³ Abdul Aziz Masyhuri, *Aula: Majalah Nabhdlatul Ulama*, Vol. 11, No. 2 (Maret 1989).

⁴⁴ Beberapa kajian menunjukkan bagaimana tokoh-tokoh ini melakukan gebrakan di dalam internal NU. Baca R. Michael Feener, *Muslim Legal Thought in Contemporary Indonesia* (Cambridge: Cambridge University Press, 2007), khususnya bab VI; dan Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris hingga Emansipatoris* (Yogyakarta: LKiS, 2005), khususnya Bab Tiga.

Pengambilan Keputusan Hukum dalam Bahtsul Masail di Lingkungan Nahdlatul Ulama pada tahun 1992.⁴⁵ Dokumen hasil Munas Alim Ulama tahun 1992 di Lampung ini berisi perubahan metode fatwa *baht̤h al-masā'il* dari beberapa aspek. Secara hierarkis, meskipun pendapat fiqh (*qawl/wajh*) tetap menjadi acuan utama, bentuk penggalian hukum yang lain juga diberi justifikasi, yaitu *ilhāq al-masā'il bi naẓā'irihā* dan *istinbat*.

Untuk menjelaskan prosedur pemilihan *qawl/wajh*, fatwa perdana tahun 1926 kembali disitir. Sedangkan dalam melakukan *ilhāq* harus memperhatikan *mulhāq bih*, *mulhāq ilayh*, dan *wajh ilhāq*. Proses ini harus dilakukan oleh *mulhīq* yang ahli dan dilakukan secara kolektif. Yang terakhir adalah penggunaan metode *istinbat* yang harus dilakukan secara kolektif dengan prosedur mazhab secara *manhājī* dengan mempraktikkan *qawā'id al-uṣūliyah* dan *qawā'id fiqhīyah*.⁴⁶ Walaupun dalam sejarah intelektual hukum Islam perdebatan seputar *ijtihād* dan *taqlid* sudah berlangsung lama,⁴⁷ metode *istinbat* inilah yang menambah identitas *baht̤h al-masā'il* NU yang tadinya hanya bermazhab secara *qawli* dengan membuka kemungkinan bermazhab secara *manhājī* dengan cara *takhrīj*. Selain permasalahan metodologis, dalam putusan ini juga ditekankan perlunya *baht̤h al-masā'il* mepergunakan kerangka pembahasan masalah yang sekaligus tercermin dalam hasil keputusannya. Kerangka pembahasan ini mencakup analisa masalah, analisa dampak, analisa hukum, dan analisa tindakan.

Seperti yang disimpulkan oleh Ahmad Zahro sebelumnya, metode *ilhāq* dan *istinbat* memang sudah pernah digunakan dalam beberapa fatwa NU.⁴⁸ Hasil Munas Lampung ini hanya justifikasi dan memberikan landasan tertulis untuk menggunakannya pada masa-masa selanjutnya. Akan tetapi permasalahannya tidak hanya sekadar justifikasi semata. Dengan memperhatikan bahwa penggunaan *qawl/wajh* masih sebagai acuan utama dalam berfatwa dalam *baht̤h al-masā'il*, dokumen Munas Lampung ini nampaknya hasil kompromi antara ulama yang mendukung *istinbat* di satu

⁴⁵ Martin van Bruinesen, *NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru* (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 1994).

⁴⁶ Tim Penyelaras LTN NU (ed.), *Aḥkām al-Fuqahā'*, 470-473.

⁴⁷ Rudolph Peters, "Idjtiḥād and Taqlid in 18th and 19th Century Islam", *Die Welt des Islams*, Vol. 20, No. 3/4 (1980), 131.

⁴⁸ Zahro, *Tradisi Intelektual NU*, 168-169.

pihak dengan ulama yang bersikukuh dengan metode *qawl* (dan *ilhāq*) sebagai satu-satunya metode berfatwa dalam *baḥṡ al-masā'il* NU di pihak lain.⁴⁹

Kelompok pertama mengharap dengan adanya hasil Munas Lampung ini, metode istinbat (khususnya) dipakai secara lebih sering dan bahkan menjadi norma dasar dalam *baḥṡ al-masā'il*. Pemaksaan penggunaan kitab-kitab fiqh dalam menjawab masalah yang tidak sesuai bisa dihentikan dengan metode istinbat ini. Begitu pula, situasi *baḥṡ al-masā'il mawḍū'iyah* bisa dihindari, meskipun disadari beberapa kalangan ternyata penggunaan metode *manhajī* memang memiliki tantangan tersendiri.⁵⁰ Sedangkan kelompok kedua tetap berkeyakinan bahwa metode istinbat hanya dipakai dalam kondisi di mana pengambilan *qawl/wajh* dan *ilhāq* sudah tidak bisa dilakukan. Hal ini bisa dilihat dari beberapa indikasi, antara lain munculnya *baḥṡ al-masā'il mawḍū'iyah* dan *qānūnīyah*,⁵¹ mengerasnya dikotomi antara mazhab *qawli* dengan mazhab *manhajī* dalam forum-forum *baḥṡ al-masā'il* tingkat PBNU (dalam Mukhtar, Munas dan Konbes), serta perdebatan yang keras seputar metode fatwa NU.

Sesuai dengan kumpulan hasil *baḥṡ al-masā'il* NU yang berjudul *Aḥkām al-Fuqahā'*, *baḥṡ al-masā'il mawḍū'iyah* pertama kali diadakan pada saat Mukhtar NU ke-29 di Cipasung, Tasikmalaya, tahun 1994.⁵² *Baḥṡ al-masā'il mawḍū'iyah* tidak untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh jamaahnya, tetapi

⁴⁹ Dalam penelitiannya, Arifi menyebut ada tiga kelompok yang terlibat dalam perdebatan ini, konservatif, moderat, dan progresif. Lihat Arifi, *Pergulatan Pemikiran Fiqih*, 223-226.

⁵⁰ Mahsun, *Mazhab NU Mazhab Kritis: Bermazhab secara Manhajī dan Implementasinya dalam Bahsul Masail Nahdlatul Ulama* (Depok: Nadi Pustaka, 2015), 6.

⁵¹ Menurut Hasyim Abbas, 'Tipe *masā'il mawḍū'iyah* (tematik/konseptual) bercirikan akar permasalahannya membutuhkan dukungan rancangan pemikiran, ide dasar, landasan teori/doktrin yang *content analysis*, studi dampak yang pragmatis sesuai kompleksitas masalah dan menerapkan logika berpikir *istiqrā'i* (induktif). Sedangkan *qānūnīyah* ditindaklanjuti dengan analisis hukum atas problema hukum *shar'i* yang diduga kontroversi pascauji banding secara intensif dengan doktrin *fuqahā'* dan undang-undang serupa di negara lain yang berpenduduk Muslim. Lihat Hasyim Abbas, "Fikrah Nahdliyah", <http://rabithah-maahid-islamiyah.blogspot.co.id/2010/01/fikrah-nahdliyah.html>, diakses pada 9 April 2017.

⁵² Tim Penyelaras LTN NU (ed.), *Aḥkām al-Fuqahā'*, 746.

untuk mempertahankan nilai-nilai keislaman yang dipegang teguh oleh NU dan mempertahankan nilai-nilai tersebut dari pemahaman-pemahaman lain yang mungkin tidak sejalan dengan nilai-nilai yang diyakini NU.⁵³ Misalnya, NU menyampaikan pandangannya tentang demokrasi, kesetaraan gender, hak-hak asasi manusia, dan seterusnya.

Dalam *baḥṡ al-masā'il mawḍu'iyah* ini, isu-isu yang diangkat bukan pertanyaan jamaah NU, melainkan dipilih oleh pengurus NU untuk dibahas. Hasil *baḥṡ al-masā'il dīniyah mawḍu'iyah* ini dijadikan pedoman bagi NU dalam isu-isu yang diangkatnya. Dalam bahasa yang disampaikan oleh K.H. Ma'ruf Amin, *baḥṡ al-masā'il mawḍu'iyah* ini berfungsi sebagai *al-difā'* (pembelaan) dan *al-ḥimāyah* (perlindungan) terhadap konsep-konsep di seputar masalah keagamaan yang berkembang.⁵⁴

Yang menarik dari *baḥṡ al-masā'il* ini adalah metodenya yang tidak menggunakan mazhab secara *qawli*, tetapi menggunakan istinbat dengan merujuk langsung kepada teks-teks al-Qur'ān dan ḥadīth. Para penyusun draf *baḥṡ al-masā'il mawḍu'iyah*, yang nampaknya adalah para pendukung istinbat, tidak sekalipun mengutip kitab-kitab fiqh. Sebaliknya, para pendukung mazhab *qawli* tidak berkeberatan dengan hal ini mengingat ini bukanlah fatwa, melainkan berupa pandangan keagamaan semata. Kemunculan *baḥṡ al-masā'il mawḍu'iyah* ini nampaknya memunculkan semacam kesepahaman yang tidak tertulis di antara para pelaku *baḥṡ al-masā'il* bahwa penggunaan metode istinbat *jama'i* yang diamanatkan dalam hasil Munas Lampung tahun 1992 adalah untuk dipergunakan dalam *baḥṡ al-masā'il mawḍu'iyah*. Sedangkan *baḥṡ al-masā'il wāqi'iyah* yang merupakan permintaan fatwa dari warga NU tetap menggunakan metode mazhab *qawli*. Hal ini terbukti pada hasil beberapa *baḥṡ al-masā'il* setelah tahun 1992 ini. Pada tahun 1994, 1997 dan 1999, *baḥṡ al-masā'il wāqi'iyah* menggunakan metode mazhab *qawli*, sedangkan *baḥṡ al-masā'il mawḍu'iyah* menggunakan pola istinbat *manhajī*.

⁵³ Soeleiman Fadeli dan Moh. Subhan, *Antologi NU* (Surabaya: Khalista, 2008), 35-36.

⁵⁴ Paparan tanpa teks yang disampaikan oleh K.H. Ma'ruf Amin pada *Baḥṡ al-Masā'il Mawḍu'iyah* Mukhtar NU ke-33 di Jombang, 3 Agustus 2015.

Pada *baḥṡ al-masā'il* tahun 2002, kesepahaman ini mulai terganggu ketika baik *baḥṡ al-masā'il wāqī'iyah* dan *mawḍū'iyah* menggunakan metode *qawli*. Sebaliknya, pada Mukhtar ke-31 tahun 2004 di Boyolali dan Munas tahun 2006, *baḥṡ al-masā'il* menggunakan metode istinbat, meskipun pola mazhab *qawli* juga digunakan. Dalam menjawab permasalahan, *baḥṡ al-masā'il* menyitir ayat al-Qur'ān, kemudian Ḥadīth Nabi, dan yang terakhir dikutip adalah *aqwāl al-'ulama'*. Sedangkan pada Mukhtar ke-32 tahun 2010 di Makassar, *baḥṡ al-masā'il mawḍū'iyah* menggunakan rujukan dari kitab-kitab fiqh, tafsir dan *sharḥ* ḥadīth. Di samping itu, beberapa permasalahan yang diangkat dalam *baḥṡ al-masā'il mawḍū'iyah* juga layak permasalahannya *wāqī'iyah* yang biasa ditanyakan para *muṣṭafī*.⁵⁵ Sedangkan dalam Munas tahun 2012 *baḥṡ al-masā'il wāqī'iyah* menggunakan metode *qawli*. Sebaliknya, pada Munas tahun 2014, *baḥṡ al-masā'il wāqī'iyah* menggunakan metode istinbat dengan mencantumkan *aqwāl al-'ulama'* sebagai rujukan setelah al-Qur'ān dan Ḥadīth Nabi.

Tabel:

Metode Fatwa yang Digunakan dalam *Baḥṡ al-Masā'il*
Tahun 1994-2015

Forum <i>Baḥṡ al-Masā'il</i>	Metode Fatwa yang digunakan	
	<i>Wāqī'iyah</i>	<i>Mawḍū'iyah</i>
Mukhtar 1994	<i>Qawli</i>	Istinbat
Munas 1996	<i>Qawli</i>	Istinbat
Mukhtar 1999	<i>Qawli</i>	Istinbat
Munas 2002	<i>Qawli</i>	<i>Qawli</i>
Mukhtar 2004	Istinbat	Istinbat
Munas 2006	Istinbat	Istinbat
Mukhtar 2010	<i>Qawli</i>	Istinbat
Munas 2012	<i>Qawli</i>	(tidak ada data)
Munas 2014	Istinbat	(tidak ada data)
Mukhtar 2015	<i>Qawli</i>	Istinbat

⁵⁵ Misalnya tentang hutang negara, hukuman bagi koruptor dan *money politics* pada Munas tahun 2002, serta persoalan tentang kriteria *kufr*, khitan perempuan, dan kriteria *ittiḥād al-majlis* dalam *aqd mu'āmalah* pada Mukhtar ke-32 tahun 2010.

Kondisi ini memperkuat analisa yang berkembang, bahwa secara internal belum ada kesepakatan dalam penggunaan metode *istinbat* ini. Penentuan penggunaan metode fatwa yang digunakan nampaknya juga sangat tergantung pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk menyusun rancangan jawaban *bahṭh al-masā'il*. Beberapa hasil *bahṭh al-masā'il* terkait metode *istinbat* kembali menegaskan keberlakuan hasil Munas Lampung tahun 1992 serta menambah penjelasannya. Misalnya, hasil Muktamar tahun 2004 mencoba memberikan penjelasan tentang urutan bermazhab secara *qawli* dan *taqrir jamā'ī*,⁵⁶ sedangkan hasil Munas Surabaya tahun 2006⁵⁷ memberikan penjabaran tentang prosedur *ilhāq* dan *istinbat jamā'ī*. Akan tetapi, itu belum mampu mengarahkan pada kesamaan pemahaman di antara para pendukung metode *qawli* dengan pendukung metode *istinbat*. Tarik ulur semakin kuat ketika hasil *bahṭh al-masā'il* Muktamar ke-32 di Makassar tahun 2010 menganulir metode fatwa yang digunakan dalam *bahṭh al-masā'il* pada Muktamar ke-31 di Solo tahun 2004, yang menyitir al-Qur'ān dan Ḥadīth Nabi sebagai rujukan utama *bahṭh al-masā'il*.⁵⁸

Mencermati fenomena ini, Ahmad Arifi menyimpulkan adanya tiga pendekatan yang dimiliki oleh ulama NU terkait dengan metode *bahṭh al-masā'il*.⁵⁹ *Pertama*, mereka yang berfiqh menggunakan nalar formalistik-tekstual. Kelompok ini juga terbagi menjadi dua: tekstualis radikal (ortodoks) dan tekstualis moderat. Sebagian besar ulama NU berada dalam kelompok ini, khususnya yang radikal. *Kedua*, kelompok pesantren yang dalam berfiqh menggunakan nalar fiqh sosial-kontekstual. Ketiga, nalar fiqh kritis (fiqh transformatif emansipatoris). Ulama NU tidak banyak dalam kelompok kedua dan ketiga ini, meskipun jumlahnya semakin bertambah dan meraih posisi dalam NU. Terbentuknya tipologi ini tidak lepas dari kemunculan dinamika pemikiran yang sudah mulai berhembus di kalangan NU sejak akhir dekade 1970an. Bisa

⁵⁶ Dalam putusan ini, *istinbat* dilakukan hanya dengan menggunakan kaidah *usūliyah*. Selain itu ditekankan pula penolakan terhadap penggunaan hermeneutika Barat dalam menafsirkan teks-teks suci keislaman. Lihat Tim Penyelaras LTN NU (ed.), *Ahkām al-Fuqaha'*, 846-849.

⁵⁷ Di dalamnya juga ada penjelasan singkat tentang prosedur. Ibid., 860-862.

⁵⁸ Ibid., 878.

⁵⁹ Arifi, *Pergulatan Pemikiran Fiqih*.

dikatakan bahwa pergeseran dan dinamika ini bersifat bertahap atau evolutif.⁶⁰

Upaya Pengarusutamaan Metode Istinbat: Pelajaran dari Mukhtar NU ke-33 Tahun 2015 di Jombang⁶¹

Pascamukhtar ke-32 tahun 2010, para pengurus aktif *bahth al-mas'ul* didominasi oleh para pendukung istinbat, misalnya K.H. Afifuddin Muhajir, Abdul Moqsih Ghazali, K.H. Arwani Faishal dan K.H. Abdul Jalil. Unikanya, hanya K.H. Arwani Faishal yang tercatat sebagai pengurus Lajnah *bahth al-mas'ul* PBNU masa khidmat 2010-2015.⁶² Menjelang Mukhtar ke-33 di Jombang tahun 2015 yang lalu, tim LBM PBNU ini menyusun agenda *bahth al-mas'ul* di mana salah satu permasalahan yang akan dibahas adalah metode istinbat. Alasan utama mengangkat permasalahan tersebut adalah belum adanya panduan teknis menyangkut metode istinbat. Hasil Munas Lampung tahun 1992 dan beberapa hasil *bahth al-mas'ul* yang membahas metode istinbat lainnya, hanya menyebutkan metode istinbat secara *jama'i* dengan menggunakan kaidah *usūliyah*, tanpa elaborasi yang memadai.

Pembahasan metode istinbat ini dilaksanakan dalam forum *bahth al-mas'ul mawdu'iyah* Mukhtar NU ke-33 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang pada tanggal 3 Agustus 2015. Materi yang disiapkan diberi judul “Metode Istinbat Hukum (*bayāni-qiyāsī-maqāṣidī*)”.⁶³ Sesuai dengan namanya, materi metode istinbat ini terdiri dari tiga bagian. Bagian *bayāni* membahas tentang interpretasi kebahasaan terhadap teks yang dalam materi ini dibagi menjadi tiga (*taḥlīl lafẓī*, *taḥlīl ma'nawī*, dan *taḥlīl dalālī*). Selain itu, *bayāni* juga menganalisa teks al-Qur'an dan Ḥadīth Nabi

⁶⁰ Rizal Mumazziz Z., “Peta Pemikiran Fiqh di Kalangan Pesantren”, *Al-Ahwal: Jurnal Kajian Hukum Keluarga dan Kajian Keislaman*, Vol. 7, No. 1 (April 2015), 82.

⁶¹ Istilah pengarusutamaan penerapan prosedur *manhajī* ini juga digunakan oleh Mahsun, *Mazhab NU*, 5.

⁶² K.H. Afifudin Muhajir dan Abdul Moqsih Ghazali tidak tercatat sebagai pengurus LBM NU periode 2010-2015. K.H. Afifudin Muhajir tercatat sebagai Katib Syuriyah PBNU 2010-2015, sedangkan Abdul Moqsih Ghazali tidak tercatat sebagai pengurus PBNU. Lihat PBNU, *Hasil-Hasil Mukhtar Ke-32 Nabdhlatul Ulama* (Jakarta: Setjen PBNU, 2011), 178.

⁶³ Pembagian istinbat menjadi tiga bagian ini mengikuti pandangan yang disampaikan oleh Muḥammad Salām Madhkūr dalam bukunya *al-Ijtihād fī al-Tashrī' al-Islāmī* sebagaimana dikutip dan diulas oleh Zahro, *Tradisi Intelektual NU*, 112-115.

dari aspek *sabab al-nuzūl*, *ta'wil* dan *maqāsid al-shari'ah*. Sedangkan metode *qiyāsī* membahas tentang kias secara rinci serta operasionalisasinya. Bagian terakhir, yaitu *maqāsidī*, menjelaskan metode *maqāsid* yang pada hakikatnya mempertimbangkan *maṣlahah*. materi ini menyebutkan beberapa metode yang teramsuk dalam *maqāsidī* ini, yaitu *istiḥsān*, *al-maṣlahah al-mursalah* dan *'urf*. Dalam menyusun materi metode istinbat ini, ada 18 rujukan yang digunakan, dan *'Ilm Uṣūl al-Fiqh* karangan 'Abd al-Wahhāb Khalāf yang menjadi rujukan utama. Sedangkan rujukan yang berasal dari mazhab Shāfi'i, yaitu *al-Kawkab al-Sāfi' Naẓm Jam' al-Jawāmi'* karangan al-Suyūṭī, *Ghāyat al-Wuṣūl* karangan Zakariyyā al-Anṣārī, dan *al-Ashbah wa al-Naẓā'ir fī al-Furū'* karangan al-Suyūṭī, hanya dikutip masing-masing satu kali. Selebihnya berasal dari buku-buku kontemporer, termasuk sebuah buku yang diduga ditulis oleh ulama Wahhābī.

Sebagaimana diduga sebelumnya, materi metode istinbat hukum ini memunculkan pro dan kontra. Kelompok yang mendukung adalah para penulis materi ini, khususnya K.H. Afifudin Muhajir dan Abdul Moqsiṭh Ghazali yang saat itu menjadi moderator. K.H. Ma'ruf Amin yang juga diberi kesempatan memberikan pandangannya juga cenderung mendukung materi ini. Selain itu, beberapa peserta *baḥṭh al-masā'il* dari Jawa Tengah juga cenderung mendukung langkah perumusan metode istinbat secara lebih operasional. Di lain pihak, tantangan yang kuat datang dari kelompok yang tetap ingin mempertahankan metode bermazhab secara konsisten dengan mengedepankan penggunaan kitab-kitab fiqh dalam menjawab masalah fiqh. Kebanyakan mereka berasal dari perwakilan NU Jawa Timur. Keberatan mereka terkait dengan aspek isi, referensi, dan asumsi-asumsi yang dipakai. Terkait dengan isinya, para penentang tidak nyaman dengan istilah yang digunakan, seperti istilah istinbat, *ijtihād*, *bayānī* dan *qiyāsī*. Mereka juga tidak setuju penggunaan beberapa metode istinbat yang bukan dari mazhab Shāfi'i seperti *istiḥsān*, *al-maṣlahah al-mursalah*, dan *maqāsid al-shari'ah*. Keberatan selanjutnya terkait dengan aspek referensi yang hanya menggunakan sedikit sekali buku dari mazhab Shāfi'i. Sebaliknya, materi metode ini mengandalkan buku *'Ilm Uṣūl al-Fiqh* tulisan 'Abd al-Wahhāb Khalāf yang bermazhab Ḥanafi. Ditambah lagi, sebagian peserta musyawarah menduga adanya satu referensi yang digunakan berasal dari kelompok Wahhābī yang

selama ini selalu menyalahkan sebagian ritual dan keyakinan warga NU.⁶⁴

Para penentang materi metode istinbat ini juga menuding para penulis materi telah keliru dalam mengasumsikan perlunya metode istinbat untuk mengisi kevakuman metodologis yang diamanatkan hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama 1992. Mereka beranggapan bahwa selama ini semua permasalahan hukum yang ditanyakan oleh warga NU selalu dapat dijawab dengan memadai dengan menggunakan metode taklid *qawli* dari buku-buku yurisprudensi ulama mazhab Shāfi'ī. Bagi mereka, kemampuan memberikan fatwa dengan menggunakan opini ulama fiqh menunjukkan bahwa metode taklid ini masih relevan. Bersikap putus asa karena tidak mampu memperoleh jawaban dari yurisprudensi hukum Islam seharusnya ditindaklanjuti dengan kajian yang lebih intensif, bukan dengan beralih kepada istinbat yang jauh dar kewenangan ulama zaman sekarang. Sedangkan hasil fatwa yang terkadang menyulitkan ataupun tidak relevan bukanlah isu utama, karena hukum harus dilaksanakan betapapun sulit atau tidak relevan. Tugas para mufti adalah menyampaikan jawaban sebagaimana yang sudah digariskan oleh para ulama terdahulu yang terekam dalam kitab-kitab fiqh muktabarah, bukan mempertanyakan validitas dan relevansinya. Demikian pula, kewajiban warga NU adalah mengikuti dan melaksanakannya.

Mekipun keberatan kelompok pendukung mazhab *qawli* sangat keras, dengan banyak dibantu oleh penjelasan K.H. Ma'ruf Amin, para peserta musyawarah (*mushāwirin*) menyetujui perlunya metode istinbat ini. K.H. Ma'ruf Amin menyatakan adanya kemungkinan suatu masalah tidak dapat dicukupi dengan *'ibārat al-kutub al-fiqhiyah* (teks yurisprudensi) dan karena dibutuhkan jawaban yang lebih memuaskan. K.H. Ma'ruf Amin bahkan mengutip referensi dari kitab yang dianggap muktabar di kalangan pesantren (*Mukhtasar al-Fawā'id al-Makkīyah* dan *Nihāyat al-Zayn*). Lagipula, K.H. Miftahul Akhyar, Rais Syuriah PWNU Jawa Timur menerapkan istinbat dalam beberapa kesempatan secara terbuka.

Persetujuan atas materi metode istinbat yang disiapkan tim *baḥṡ al-masā'il mawḍu'iyah* disertai dengan sejumlah catatan dari

⁶⁴ Buku yang dimaksud adalah tulisan al-Jīzānī yang berjudul *Manhaj al-Salaf fi al-Jam' bayn al-Nuṣūṣ wa al-Maqāṣid wa Taḥqīqatuhā al-Mu'a'ṣirah*, yang diterbitkan oleh al-Mamlakat al-'Arabīyah al-Sa'ūdīyah Wizārat al-Ta'lim al-'Ālī.

pendukung mazhab *qawli*. Catatan pertama terkait dengan menyamakan persepsi seputar istilah istinbat dan ijtihad. Perdebatan seputar dua istilah tersebut sangat sengit. Masing-masing pihak menyuguhkan argument yang kuat dan didukung dengan rujukan yang sama-sama mu'tabar. Pihak pendukung materi metode istinbat ini berpandangan bahwa istinbat tidak sama dengan ijtihad, sedangkan pendukung mazhab *qawli* berpandangan bahwa istinbat esensinya adalah ijtihad. Catatan kedua terkait dengan sistematika dan rujukan yang digunakan dalam materi metode istinbat ini yang sedapat mungkin disesuaikan dengan mazhab Shāfi'i. Catatan selanjutnya adalah terkait motif di balik perumusan metode istinbat ini. Kesediaan tim penyusun materi ini khususnya K.H. Afifudin Muhajir dan Abdul Moqsith Ghazali, untuk memberikan penjelasan yang tegas bahwa di antara tujuan penetapan metode istinbat ini adalah untuk meminimalisir dilakukannya penafsiran teks-teks suci (al-Qur'ān dan Ḥadīth Nabi) secara gegabah sembari mengabaikan khazanah fiqh yang selama ini dijunjung tinggi oleh kalangan NU. Permintaan ini secara eksplisit disampaikan oleh K.H. Muhibbul Aman Aly menjelang disetujuinya materi istinbat ini.⁶⁵ Pernyataan K.H. Afifudin Muhajir yang membuat jarak dengan penafsir modern seperti Muḥammad Arkoun, Muḥammad 'Ābid al-Jābirī dan mazhab *historism* seperti Muḥammad Shaḥrūr menunjukkan bahwa dirinya tetap berada dalam naungan fiqh yang memiliki metode yang jelas sebagaimana yang digariskan ulama salaf.

Meskipun demikian, penerimaan atas materi metode istinbat ini nampaknya tidak akan berbuah banyak. Ada beberapa hal yang menyebabkan metode istinbat hasil Muktamar ke-33 ini tidak akan dipraktikkan secara luas dalam *baḥṡ al-masā'il*. Yang pertama terkait tidak digunakannya kitab usul fiqh mazhab Shāfi'i sebagai rujukan utama. Hal ini diperparah dengan kengototan K.H. Afifudin Muhajir yang cenderung mempertahankan keputusannya menggunakan rujukan utama non-Shāfi'iyah tersebut dengan secara khusus memuji buku *Ilm Uṣūl al-Fiqh* karangan 'Abd al-Wahhāb Khalāf.

Yang kedua adalah bahwa metode istinbat ini akan menjadi lompatan terlalu jauh bagi sebagian besar *mushāwirin* yang menolak

⁶⁵ K.H. Muhibbul Aman Aly adalah pengurus PWNU Jawa Timur dan juga pengasuh PP. Sidogiri, Pasuruan. Selain itu, ia juga pembina forum *baḥṡ al-masā'il* antarpesantren salaf.

rumusan materi metode istinbat ini. Hal ini disebabkan karena mereka diharapkan untuk memberikan pembenaran melakukan istinbat yang mereka yakini di luar kompetensi dan etika bermazhab yang mereka anut. Kemudian, mereka juga diminta menyetujui penggunaan metode istinbat dalam tingkatan yang tinggi yang sebelumnya hanya bisa dilakukan oleh para tokoh utama mazhab (*mujtahid muṭlaq*). Selanjutnya, mereka juga diminta memberikan persetujuan mereka jika suatu ketika dengan menggunakan metode istinbat ini mereka harus rela dengan jawaban yang berseberangan dengan opini para tokoh utama mazhab yang selama ini mereka anut. Akhirnya, mereka juga diminta menyetujui sebuah metode istinbat yang sebagian besar isinya tidak mencerminkan metode istinbat yang mereka pelajari dari buku-buku usul fiqh mazhab Shāfiʿī selama ini. Akan lebih mudah bagi kelompok penganut mazhab *qawli* untuk menerima materi metode ini andaikan perumus materi metode istinbat ini sedapat mungkin memperhatikan beban psikologis para penganut mazhab *qawli* dengan cara hanya menggunakan rujukan dari mazhab Shāfiʿī dengan sistematika tidak berbeda jauh dari sistematika kitab usul fiqh mazhab ini.

Indikasi ketidakefektifan metode istinbat ini bahkan mulai terlihat ketika beberapa peserta yang menanyakan kepada Tim Penyusun Materi istinbat ini (khususnya kepada KH. Afifudin Muhajir dan K.H. Maʿruf Amin) tentang ulama di lingkungan NU yang berwenang menggunakan metode istinbat ini. Jawaban dari perumus materi ini adalah bahwa siapapun yang telah memiliki kecakapan untuk melakukan istinbat pada dasarnya bisa menerapkan metode ini. Diskusi ini menunjukkan keengganan mereka untuk melakukan istinbat jika memang nantinya materi metode istinbat ini disetujui dengan alasan bukan derajat atau *maqam* mereka karena tidak (akan pernah) memiliki kecakapan yang dibutuhkan. Dengan kata lain, mereka mengindikasikan bahwa metode istinbat *jamaʿī* ini boleh saja disetujui dan diterapkan oleh ulama setingkat PBNU (seperti para penyusun metode istinbat ini), tapi para pendukung mazhab *qawli* ini tidak akan mempraktikkannya. Mereka akan tetap menggunakan metode taklid *qawli* (*ʿibarat kitāb, taqrīr, ilhāq*, ditambah dengan *talfīq*) dalam *baḥṡ al-masāʾil* yang selama ini mereka praktikkan dan mereka anggap cara

yang paling bertanggungjawab dalam menjawab permasalahan hukum.

Anggapan seperti di atas nampaknya juga ada benarnya mengingat keterangan Abdul Moqsith Ghazali, selaku Tim Penyusun metode istinbat ini, mengindikasikan bahwa metode ini akan diterapkan dalam *baḥṭh al-masā'il mawḍū'iyah* saja. Dengan demikian, para penolak metode istinbat tidak akan terlalu kecewa bila penolakan mereka tidak membuahkan hasil dan metode istinbat ini disahkan. Mereka selama ini hanya melakukan *baḥṭh al-masā'il waqī'iyah* dengan menggunakan mazhab *qan'li*. Dengan demikian, usaha pengarusutamaan metode istinbat di lingkungan NU ini tidak sepenuhnya berhasil, sebagaimana nasib hasil Munas Lampung tahun 1992 yang tidak mampu menggerakkan seluruh ulama NU untuk menggunakan metode istinbat secara lebih terbuka.

Pelaksanaan *Baḥṭh al-Masā'il* PWNU Jawa Timur Pasca-Muktamar ke-33

Untuk mengetahui penggunaan hasil *baḥṭh al-masā'il mawḍū'iyah* terkait metode istinbat Muktamar NU ke-33 ini, perlu dipaparkan bagaimana forum-forum *baḥṭh al-masā'il* sesudah disahkannya hasil-hasil Muktamar NU ke-33. Oleh karena kalangan ulama yang dalam *baḥṭh al-masā'il* Muktamar NU ke-33 lalu secara tegas menolak penggunaan metode istinbat adalah para ulama di lingkungan PWNU Jawa Timur, maka akan dipaparkan pelaksanaan *baḥṭh al-masā'il* yang dilakukan pascamuktamar NU ke-33 tahun 2015 yang lalu.

PWNU Jawa Timur termasuk yang paling rutin dalam menyelenggarakan *baḥṭh al-masā'il* di tingkat kepengurusan wilayah. Hal ini dapat dibuktikan dengan diterbitkannya buku kumpulan *baḥṭh al-masā'il* PWNU Jawa Timur beberapa tahun yang lalu.⁶⁶ Kumpulan hasil *baḥṭh al-masā'il* PWNU Jawa Timur tersebut

⁶⁶ Buku kumpulan *baḥṭh al-masā'il* PWNU Jawa Timur ini berjudul *NU Menjawab Problematika Umat; Keputusan Baḥṭsul Masail PWNU Jawa Timur*. Buku ini terdiri dari dua jilid yang diterbitkan secara bersamaan. Jilid 1 memuat hasil-hasil *baḥṭh al-masā'il* PWNU Jawa Timur kurun waktu 1979-2009, dan terdiri dari 369 masalah. Sedang jilid 2 memuat hasil-hasil *baḥṭh al-masā'il* kurun waktu 2009-2014, dan terdiri dari 111 masalah. Buku kumpulan *baḥṭh al-masā'il* ini diterbitkan oleh Pengurus Wilayah LBMNU Jawa Timur bekerja sama dengan Khalista tahun 2015.

merekam pelaksanaan *baḥṡ al-masā'il* yang mereka selenggarakan dalam kurun waktu 1979 sampai 2009. Sampai saat ini, setelah Mukhtar NU ke-33 tahun 2015 yang lalu, PWNU Jawa Timur paling tidak sudah menyelenggarakan *baḥṡ al-masā'il* sebanyak empat kali, yaitu; *baḥṡ al-masā'il* di Pondok Pesantren Daris Sulaimaniyah Kamulan, Durenan, Trenggalek pada 7-8 November 2015; *baḥṡ al-masā'il* di Universitas Negeri Malang 13 Februari 2016; *baḥṡ al-masā'il* di UIN Maulana Malik Ibrahim 10 Desember 2016; *baḥṡ al-masā'il* di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kebun Baru Palengaan, Pamekasan pada 1-2 April 2017; dan *baḥṡ al-masā'il* di Pondok Pesantren Sunan Bejagung Semanding, Tuban pada 10-11 Februari 2018.

Sebagaimana perdebatan yang terekam dalam *baḥṡ al-masā'il mawḍū'iyah* Mukhtar NU ke-33 pada 1-5 Agustus 2015 seputar metode istinbat, penggunaan metode istinbat dilakukan bukan sebagai metode utama dan pertama dalam *baḥṡ al-masā'il*. Metode istinbat juga harus dilakukan secara *jamā'i* mengingat adanya persepsi rendahnya kemampuan di kalangan ulama fiqh. Selain itu, ada usulan agar penggunaan metode istinbat hanya dibatasi pada komisi *baḥṡ al-masā'il mawḍū'iyah* sebagaimana dulu awalnya telah dilakukan semenjak *baḥṡ al-masā'il mawḍū'iyah* diperkenalkan di tahun 1994 dalam Mukhtar NU di Pesantren Cipasung, Tasikmalaya. Oleh karena itu, hasil-hasil *baḥṡ al-masā'il mawḍū'iyah* PWNU Jawa Timur akan dipaparkan karena dalam *baḥṡ al-masā'il wāq'i'iyah* yang diselenggarakan oleh PWNU Jawa Timur pasca-mukhtar ke-33, hanya menggunakan metode *qawli*.⁶⁷ Dua kesempatan *baḥṡ al-masā'il mawḍū'iyah* akan disoroti untuk menunjukkan variasi dan fleksibilitas penggunaan metode, yaitu *baḥṡ al-masā'il* di Pondok Pesantren Daris Sulaimaniyah Kamulan, Durenan, Trenggalek pada 7-8 November 2015, dan *baḥṡ al-masā'il* di Universitas Negeri Malang pada 13 Februari 2016.

⁶⁷ Di antara permasalahan *wāq'i'iyah* yang dibahas oleh *baḥṡ al-masā'il* PWNU Jawa Timur setelah Mukhtar ke-33 adalah permasalahan cadaver untuk keperluan studi kedokteran, penentuan batas desa dalam permasalahan *qasr* salat, pembayaran zakat fitrah dengan uang, penggunaan nama Tuhan untuk nama anak yang baru lahir, uang elektronik, bitcoin, dan batas aurat wajah wanita saat salat.

Permasalahan yang dibahas dalam komisi *maḥdū'iyah* pada *baḥṡ al-masā'il* Pondok Pesantren Daris Sulaimaniyah Kamulan, Durenan, Trenggalek pada 7-8 November 2015 ini berjudul *Konsep Nāẓir Wakaf dan Kaitannya dengan Takmir, Pengurus Yayasan, dan Semisalnya*. Di dalam judul ini, terdapat beberapa permasalahan yang dibahas, yaitu: definisi, hukum pengangkatan dan penerimaan jabatan (hukum pengangkatan, penerimaan jabatan, dan hukum mengangkat *nāẓir* definitif ketika sudah ada takmir, pengurus yayasan dan semisalnya), pergantian jabatan *nāẓir* (pemberhentian dan pewarisan jabatan), dan gaji *nāẓir*. Nampaknya, permasalahan ini sudah dibahas dalam *baḥṡ al-masā'il* PWNU Jawa Timur sebelumnya, yaitu pada 4-5 April 2015, di Pondok Pesantren Manba'ul Maarif Denanyar, Jombang. Namun, pembahasannya belum tuntas sehingga dilanjutkan pada *baḥṡ al-masā'il* di Trenggalek ini.

Dari sisi metode penjawaban masalah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar *nāẓir* wakaf *baḥṡ al-masā'il* ini menggunakan metode *qawli*, yaitu dengan mengutip pendapat para ulama fiqh dari kitab-kitab fiqh. Terkait pewarisan jabatan *nāẓir*, *baḥṡ al-masā'il* ini menjawab bahwa jabatan *nāẓir* tidak dapat diwariskan, namun dapat digantikan oleh ahli waris *nāẓir* setelah meninggalnya. Kitab-kitab yang dikutip antara lain: *Fatāwā wa Rudūd* karya Sayyid Muḥammad b. Aḥmad as-Shāṭirī, *Faṡḥ al-Mu'in*, dan *I'ānat al-Ṭālibin* karya Zayn al-Dīn b. 'Abd 'Aziz al-Malībārī dan Abū Bakr b. al-Sayyid Muḥammad Shaṭā al-Dimyāṭī, dan *Bughyat al-Mustarshidin* karya 'Abd al-Raḥmān Bā'alawī, *al-Fatāwā al-Fiqhiyyah al-Kubrā* karangan Ibn Hajar al-Haytamī, dan *'Umdat al-Muftī wa al-Mustaftī* oleh Muḥammad 'Abd al-Raḥmān Aḥdal.

Selanjutnya, dalam menjelaskan syarat-syarat *nāẓir*, *baḥṡ al-masā'il* ini menjawab bahwa seorang *nāẓir* haruslah adil dan *kifāyah* (kompeten dalam melaksanakan tugas). Beberapa penjelasan tambahan disampaikan terkait dengan persyaratan ini tergantung dengan penunjukan *nāẓir*. Jika *nāẓir* ditunjuk oleh *wāqif*, maka adil dipersyaratkan cukup adil secara lahir, tetapi bila diangkat oleh hakim (pemerintah/penguasa), maka dipersyaratkan adil secara lahir dan batin. *Baḥṡ al-masā'il* ini juga menjelaskan, bahwa menurut ulama mazhab Ḥanbalī, *nāẓir* yang diangkat oleh *wāqif* tidak disyaratkan adil, namun cukup dengan diawasi oleh orang

adil. Jawaban ini didukung dengan beberapa kutipan dari kitab-kitab fiqh, antara lain *Nihāyat al-Maṭlāb fī Dirāyat al-Madhhab* karangan al-Juwaynī, *Asnā al-Maṭālib wa Ḥaṣḥiyat al-Ramlī* karangan al-Qāḍī Zakariyyā al-Anṣārī, dan *al-Furū'* karangan Abū Bakr Muḥammad b. Aḥmad b. Muḥammad al-Qāḍī b. al-Ḥaddād. Setelah menyodorkan kutipan-kutipan pandangan ulama fiqh di atas, *baḥṡ al-masā'il* ini melanjutkan penjelasan tentang syarat *nāẓir*, yaitu jika diketahui bahwa *nāẓir* tidak memenuhi syarat, maka hakim dapat menggantinya dengan orang lain sesuai dengan kriteria yang diminta *wāqif*. Setelah tambahan penjelasan ini, beberapa kutipan dari kitab-kitab fiqh kembali disodorkan, yaitu: *Asnā al-Maṭālib*, *Nihāyat al-Muḥtāj*, *Majmū' al-Fatāwā* karya al-Ḥabīb 'Abd Allāh b. 'Umar al-'Alawī, *al-Majmū' Sharḥ al-Muhadḥhab*, *al-Sharawānī 'alā Tuhfat al-Muḥtāj fī Sharḥ al-Minhāj*.

Setelah membahas persyaratan *nāẓir* di atas, kemudian pembahasan dilanjutkan tentang tugas *nāẓir*. *Baḥṡ al-Masā'il* ini memberikan penjelasan bahwa tugas *nāẓir* adalah menjaga harta pokok wakaf dan mengembangkan hasilnya, dengan menyewakannya, membangun, membagikan hasilnya kepada orang-orang yang berhak, dan berbagai hal yang berkaitan dengan kemaslahatan wakaf. Penjelasan ini berdasarkan dua kutipan dari kitab fiqh, yaitu: *Takmilah* karya Shaykh Muḥammad Najīb b. Ibrāhīm al-Muṭī'ī dan *al-Fatāwā al-Fiqhiyyah al-Kubrā* karya Ibn Ḥajar al-Haytamī. *Baḥṡ al-Masā'il* ini kemudian memberikan tambahan penjelasan terkait tugas *nāẓir* ini dengan menyatakan bahwa *nāẓir* harus menjalankan berbagai tugasnya dengan penuh kehati-hatian dengan prinsip maslahat karena ia mengelola untuk kemaslahatan orang lain. Untuk menguatkan pernyataan ini, pendapat Ibn Ḥajar al-Haytamī dan al-Sharawānī dikutip.

Selanjutnya, *baḥṡ al-masā'il* ini memberikan penjelasan tentang sanksi yang dikenakan kepada *nāẓir* bila benda wakaf rusak atau hilang yang terjadi tanpa keteledoran *nāẓir*. Mengingat kewenangan *nāẓir* wakaf adalah kewenangan yang didasarkan atas kepercayaan (amanah), maka hal ini tidak menyebabkan keharusan untuk bertanggungjawab dalam bentuk materi atau finansial. *Nāẓir* hanya perlu bersumpah bahwa ia tidak sengaja atau tidak memiliki niat buruk untuk melalaikan tugasnya sebagai *nāẓir*. Akan tetapi, jika diduga telah melakukan kekeliruan, maka *nāẓir* bisa diminta untuk

menunjukkan bukti bahkan perlu audit lebih lanjut. Jawaban ini dilandaskan kepada beberapa kutipan kitab fiqh, antara lain fiqh mazhab Ḥanafiyah seperti ‘Alī Haydar dalam *Ḍurar al-Hukkām Sharḥ Majallat al-Aḥkām*, Vol. 4/449; *al-Fatāwā al-Fiqhīyah al-Kubrā* tulisan Ibn Ḥajar al-Haytamī, Vol. 3/251; *Asnā al-Maṭālib*, Vol. 1/361; ‘Abd Ḥamīd al-Sharawānī, pada *Ḥawāshī al-Sharawānī wa al-‘Abbādī*, Vol. 4/290; *Bughyat al-Mustarshidīn* tulisan ‘Abd al-Raḥmān Bā‘alawī; Ibn al-Qāsim al-‘Abbādī, pada *Tajrīd Tahrīr wa Taqyīd Ibn Qāsim al-‘Abbādī ‘alā Sharḥ Bahjat al-Wardīyah*, Vol. 12/363; *Qawā’id al-Aḥkām fī maṣāliḥ al-Anām*, *Ḥāshiyat al-Ramlī* dan *Nihāyat al-Muḥtāj*.

di akhir permasalahan *nāẓir* wakaf ini, *baḥṡ al-masā’il* menjelaskan kedudukan takmir masjid yang selama ini mengelola masjid-masjid hasil wakaf. Dinyatakan dalam *baḥṡ al-masā’il* ini bahwa takmir masjid adalah tenaga teknis *nāẓir*. Takmir bertugas (1) membangun, merawat, memperbaiki, dan memperindah masjid, dan (2) salat dan beribadah di dalamnya, tetapi ia tidak memiliki hak untuk menguasainya. Istilah takmir yang ada pada mazhab Ḥanafī dan Shāfi‘ī, hanya sekedar membangun dan meramaikan, bukan menguasai. Jika takmir, pengurus yayasan, dan semisalnya menguasai harta wakaf tanpa pengangkatan sebagai *nāẓir* maka hukumnya haram, dan hakim harus mengambil harta wakaf tersebut darinya, kecuali bila penguasaannya terhadap harta wakaf berdasarkan penyaratan *wāqif* dan dengan jalan yang benar. Rujukan-rujukan yang digunakan cukup beragam meskipun masih dalam jalur bermazhab secara *qawli*, yaitu *Rawā’i‘ al-Bayān fī Tafsīr Āyat al-Aḥkām* karangan Muḥammad ‘Alī al-Ṣābūnī, Vol. 1/572; *Bughyat al-Mustarshidīn* tulisan ‘Abd al-Raḥmān Bā‘alawī, dan *I‘ānat al-Ṭālibīn* tulisan Abū Bakr b. al-Sayyid Muḥammad Shaṭā al-Dimyātī.

Terlihat dalam pembahasan masalah *nāẓir* di atas bahwa PWNU Jawa Timur menggunakan metode taqlid *qawli* dalam merumuskan jawabannya. Semua rujukan berasal dari kitab-kitab fiqh mazhab Shāfi‘ī, meskipun ada pengecualian. Pengecualian pertama adalah penggunaan kitab fiqh mazhab Ḥanafī, dalam hal ini adalah *Ḍurar al-Hukkām Sharḥ Majallat al-Aḥkām* tulisan ‘Alī Haydar. Penggunaan kitab fiqh dari mazhab lain memang sudah mulai terjadi dalam beberapa kali *baḥṡ al-masā’il* di kalangan NU. Lagipula, dalam Munas Alim Ulama tahun 2006 di Surabaya, kitab-

kitab fiqh mazhab Sunnī selain Shāfi'ī (Ḥanafā, Mālikī dan Ḥanbalī) termasuk kitab yang muktabar.⁶⁸ Selain itu, ada juga rujukan terhadap sebuah kitab tafsir al-Qur'ān, yaitu *Rawā'i' al-Bayān fī Tafsīr Āyat al-Aḥkām* karangan al-Ṣābūnī, Vol. 1/572. Ada beberapa hal menarik tentang rujukan ini. Kitab ini bukanlah kitab fiqh, melainkan tafsir, meskipun tafsir terkait ayat-ayat hukum, dan kitab ini ditulis oleh ulama yang termasuk kategori kontemporer. Pengutipan kitab tafsir dalam *baḥṡ al-masā'il* memang terjadi beberapa tahun terakhir. Hal ini digunakan untuk menghindari pengutipan ayat al-Qur'ān secara langsung yang berarti melakukan ijtihad. Alasan senada juga dilakukan dengan ḥadīth yang biasanya dikutip dari kitab *sharḥ*, bukan dari kitab kumpulan ḥadīth aslinya. Di balik penggunaan dua rujukan di atas, terbentuk kesan bahwa di kalangan *baḥṡ al-masā'il* NU memang sedang terjadi pergeseran metodologis.

Pergeseran metodologis yang semakin jauh terjadi dalam *baḥṡ al-masā'il mawḍu'iyah* PWNU Jawa Timur pada 13 Februari 2016, di Universitas Negeri Malang. Ada beberapa hal yang perlu disampaikan mengenai *baḥṡ al-masā'il* ini. Hal yang serta merta mengundang pertanyaan adalah terkait lokasi penyelenggaraan. Selama ini, penyelenggaraan dilaksanakan di pondok pesantren, tetapi *baḥṡ al-masā'il* PWNU Jawa Timur kali ini dilaksanakan di sebuah kampus, bahkan sebuah kampus negeri yang bukan berbasis keislaman seperti UIN ataupun IAIN. Selain lokasi yang merupakan anomali, yang sangat menarik perhatian dalam *baḥṡ al-masā'il mawḍu'iyah* kali ini adalah permasalahan yang diangkat, yaitu tentang Islam Nusantara. Sepanjang pengetahuan penulis, inilah forum internal NU yang pertama kali secara serius merespons konsep Islam Nusantara yang dicanangkan oleh PBNU menjelang Mukhtar NU ke-33⁶⁹ dan dibahas mendalam dalam Mukhtar tersebut. Tentunya, konsep Islam Nusantara bukan semata permasalahan fiqh, dan hal ini tercermin dalam hasil *baḥṡ al-masā'il*

⁶⁸ Tim Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) PBNU, *Abkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010 M)* (Surabaya: Khalista dan LTN PBNU, 2011), 862-874.

⁶⁹ "Jelang Mukhtar ke-33 NU: Apa yang dimaksud dengan Islam Nusantara?," dalam <https://www.nu.or.id/post/read/59035/apa-yang-dimaksud-dengan-islam-nusantara>.

ini. Akan tetapi, dikarenakan NU dikenal sebagai kalangan Islam yang mengakomodasi budaya lokal (Indonesia), pembahasan secara teologis atau normatif dalam bentuk fatwa terhadap praktek akomodasi ini cepat atau lambat pasti dibutuhkan.⁷⁰

Poin-poin pembahasan tentang Islam Nusantara yang dikaji dalam *baḥṡ al-masā'il* PWNU Jawa Timur pad 13 Februari 2016, yang tertuang dalam dokumen yang berjudul *Hasil Baḥṡul Masail PWNU Jawa Timur tentang Islam Nusantara*, terkait (1) maksud Islam Nusantara; (2) Metode dakwah Islam Nusantara (3); landasan dalam menyikapi tradisi/budaya; (4) sikap dan toleransi terhadap pluralitas agama dan pemahaman keagamaan; dan (5) konsistensi menjaga persatuan bangsa untuk memperkokoh integritas NKRI. Dokumen sepanjang 25 halaman ini diawali dengan pengakuan terhadap keragaman budaya, termasuk di dalamnya budaya yang dilaksanakan di Nusantara terkait kelahiran, kematian, perkawinan, pakaian dan keagamaan. Untuk memperkuat pandangan ini, kitab *al-Muqaddimah* yang ditulis Ibn Khaldūn dikutip, kitab ini sebenarnya bukan kitab fiqh, melainkan sosiologi sejarah. Selanjutnya, dalam poin pertama tentang maksud Islam Nusantara, dinyatakan:

Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang diamalkan, didakwahkan, dan dikembangkan di bumi Nusantara oleh para pendakwahnya, yang di antara tujuannya adalah untuk meng-antisipasi dan membentengi umat dari paham radikalisme, liberalisme, Shī'ah, Wahhābī, dan paham-paham lain yang tidak sejalan dengan Ahlussunnah wal Jamaah.⁷¹

Untuk memperkuat pandangan ini, kitab *Risālat Aḥl al-Sunnah wa al-Jamā'ah* yang ditulis oleh K.H. Hasyim Asy'ari dikutip. Selain definisi tersebut, dinyatakan pula bahwa Islam Nusantara menurut NU adalah “sebagai metode (*manhaj*) dakwah Islam di bumi Nusantara di tengah penduduknya yang multi etnis, multibudaya dan multiagama yang dilakukan secara santun dan damai”.⁷² Pernyataan ini diper-kuat dengan kutipan dari sebuah kitab tentang penyebaran Islam di Jawa yang berjudul *Aḥlā al-Musāmarah fī*

⁷⁰ Maimun, “Akomodasi Budaya Lokal dalam Fatwa-Fatwa Nahdlatul Ulama”, *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 1 (2016), 114.

⁷¹ Hasil Baḥṡul Masail PWNU Jawa Timur tentang Islam Nusantara, 4.

⁷² Ibid.

Ḥikāyat al-Anḥiyā' al-'Ashrah yang ditulis oleh Shaykh Abū al-Faḍl al-Senūrī, Tuban.

Pembahasan kedua tentang metode dakwah Islam Nusantara “yang ramah, santun, dan penuh hikmah, setidaknya meliputi metode dakwah Islam Nusantara masa Walisongo dan masa kekinian”,⁷³ yang terdiri dari beberapa aspek, antara lain; pendidikan, kaderisasi, dakwah, jaringan, budaya, dan politik. Untuk mendukung jawaban ini, kitab *Aḥlā al-Musāmarah fī Ḥikāyat al-Anḥiyā' al-'Ashrah* kembali dikutip. Selain itu, kitab *Shams al-Zāhirah fī Nasab Ahl al-Bayt Min Banī 'Alawī Furū' Faṭimah al-Zabrā' wa Amīr al-Mu'minīn 'Alī* karangan 'Abd al-Raḥmān b. Muḥammad b. Ḥusayn al-Manshūr. Selanjutnya ditekankan bahwa metode dakwah Islam Nusantara harus “tetap berpijak pada aturan *shar'*”.⁷⁴ Lebih lanjut disebutkan bahwa metode tersebut dapat dilakukan dengan: (a) Berdakwah dengan hikmah, *man'izah ḥasanah*, dan berdialog dengan penuh kesantunan; (b) Toleran terhadap budaya lokal dan tidak dipertentangkan dengan agama; (c) Memberi teladan dengan *al-akhlāq al-karimah*; (d) Memprioritaskan *maṣlahah 'ammah* dari pada *maṣlahah khāṣṣah*; (e) Berprinsip *irtikāb akhaff al-darārāy*; (f) Berprinsip *dar' al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ*. Dalam menerapkan prinsip *maṣlahah*, *baḥṡ al-masā'il* ini menekankan perlunya kehati-hatian dengan cara senantiasa berpegangan pada nas dan mazhab fiqh yang otoritatif (*al-madhbhab al-mudawwan*). Beberapa ayat al-Qur'ān yang menunjukkan otoritas kebenaran Tuhan dikutip langsung untuk memperkuat hal ini, antara lain al-Qur'ān [4]: 11, al-Mu'minūn [23]: 71 dan Āli 'Imrān [3]: 60. Selain itu, sebuah kutipan yang menganjurkan berdakwah dengan lemah-lembut juga dikutip dari kitab *al-Taqdīr min al-Mujāzafah bi al-Takfīr* tulisan al-Sayyid al-'Alawī al-Mālikī juga disuguhkan. Senada dengan kutipan yang menunjukkan anjuran berdakwah dengan cara yang lembut-lembut, dua kitab tafsir juga disajikan, yaitu *al-Baḥr al-Madīd* tulisan Ibn 'Aḥībah al-Mālikī dan *al-Baḥr al-Muḥīṭ* karya Abā Ḥayyān al-Andalusī. Selain terkait dengan metode dakwah, dua kitab usul fiqh, yaitu *al-Mustasfā* tulisan al-Ghazālī, *al-Maḥṣūl*-nya al-Rāzī, dan *al-Iḥkām*-nya al-Āmidī juga

⁷³ Ibid., 5.

⁷⁴ Ibid., 8.

dikemukakan untuk menegaskan terbatasnya penggunaan *maṣlahah* pada hal-hal yang sifatnya darurat semata.

Dalam sisa pembahasan *baḥṡ al-masā'il* tentang Islam Nusantara ini (poin 3, 4 dan 5) terus menggunakan pola gabungan seperti di atas (poin 1 dan 2). Beberapa ayat al-Qur'ān dikutip langsung dan melalui kitab tafsir, beberapa ḥadīth juga dikutip langsung dari kitab ḥadīth disertai kutipan dari kitab *sharḥ*-nya, kutipan dari kitab sejarah dan kitab akhlaq juga disodorkan, dan tak lupa kutipan dari kitab fiqh dan usul fiqh, baik kitab *turāṡ* ataupun *mu'āṣirah*, baik Shāfi'iyah ataupun mazhab *mudawwan* lainnya, juga tetap menghiasi sisa pembahasan *baḥṡ al-masā'il* ini. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu seperti pembahasan tentang Islam Nusantara yang membutuhkan pendekatan tidak hanya dari perspektif fiqh saja, penggunaan metode istinbat dilakukan. Lebih-lebih, karena pembahasan ini bukan melulu tentang fiqh, maka bagi beberapa kalangan pengutipan langsung dari al-Qur'ān dan ḥadīth tidak dapat sepenuhnya disebut metode istinbat. Penggunaan nas al-Qur'ān dan ḥadīth secara langsung (tidak dari tafsir ataupun *sharḥ*) dalam *baḥṡ al-masā'il mawḍū'iyah* ini sudah kerap terjadi di *baḥṡ al-masā'il* tingkat PBNU. Sehingga, penggunaan nas al-Qur'ān dan ḥadīth secara langsung untuk permasalahan yang tidak murni fiqh ini tidak menyalahi komitmen bermazhab secara *qawli*.

Penutup

Sebagai sebuah lembaga *iftā'* yang menjadi rujukan kaum tradisional Muslim di Indonesia, *baḥṡ al-masā'il* NU telah banyak berperan, khususnya melalui berbagai hasil *baḥṡ al-masā'il* yang dihasilkannya. Perkembangan internal NU, khususnya di bidang metode penjawaban masalah keagamaan yang diajukan kepada NU telah membawa diskursus baru yang terbukti sampai sekarang belum berada dalam kondisi yang bisa diterima berbagai pihak yang berkepentingan. Kelompok pendukung mazhab *qawli* di satu sisi dan penganjur istinbat *manḥajī* di sisi lain menghendaki metode yang mereka usung diterapkan dalam *baḥṡ al-masā'il*. Pembagian *baḥṡ al-masā'il* menjadi *wāqī'iyah* yang menggunakan metode mazhab *qawli* dan *mawḍū'iyah* yang menggunakan istinbat *manḥajī* sempat menjadi sebuah solusi walau tidak berumur panjang (1994-1999). Setelah itu, terjadi pertarungan wacana di antara kelompok

yang berbeda sebagaimana tercermin dalam *baḥṡ al-masā'il* di awal abad ke-21 ini.

Perkembangan terakhir, sebagaimana terekam dalam pembahasan metode istinbat Mukhtar NU ke-33 di Jombang dua tahun yang lalu, menunjukkan bahwa perdebatan seputar metode ini masih akan terus berlanjut di waktu-waktu mendatang. Sebuah prediksi yang kemudian dipastikan kebenarannya adalah bahwa para ulama penolak metode istinbat ini tidak akan serta merta menggunakannya, sebagaimana terekam dalam *baḥṡ al-masā'il* PWNU yang diselenggarakan setelah mukhtar NU ke-33 ini. Hal ini terbukti dalam beberapa *baḥṡ al-masā'il* yang diselenggarakan oleh PWNU Jawa Timur pascamukhtar ke-33 tersebut. Semua pembahasan *baḥṡ al-masā'il wāqī'iyah* tetap menggunakan metode *qawli*, meskipun dengan mengutip secara eklektis lintas mazhab. Sedangkan dalam *baḥṡ al-masā'il mawḍū'iyah*, penggunaan metode istinbat mulai terlacak, khususnya dalam permasalahan yang membutuhkan berbagai pendekatan yang tidak murni *fiqhīyah* sebagaimana permasalahan Islam Nusantara di atas.

Daftar Rujukan

- Abbas, Hasyim. "Fikrah Nahdliyah", <http://rabithah-maahid-islamiah.blogspot.co.id/2010/01/fikrah-nahdliyah.html>, diakses pada 9 April 2017.
- Amin, Ma'ruf. *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*. Depok: eLSAS Jakarta, 2008.
- , Paparan tanpa teks yang disampaikan pada *Baḥṡ al-Masā'il Mawḍū'iyah* Mukhtar NU ke-33 di Jombang, 3 Agustus 2015.
- Arifi, Ahmad. *Pergulatan Pemikiran Fiqih "Tradisi" Pola Madhhab*. Sleman: eLSAQ Press, 2010.
- Fadeli, Soeleiman, dan Subhan, Moh. *Antologi NU*. Surabaya: Khalista, 2008.
- Fareed, Muneer. "Against Ijtihad", *The Muslim World*, Vol. 91, No. 3/4, 2001.
- Feener, R. Michael. *Muslim Legal Thought in Contemporary Indonesia*. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
- Fuad, Mahsun. *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*. Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Hooker, MB. *Indonesian Islam: Social Change through Contemporary Fatawa*. Crows Nest: ASAA, 2003.

- Hosen, Nadirsyah. "Nahdlatul Ulama and Collective Ijtihad", *New Zealand Journal of Asian Studies*, Vol. 6, No. 1, Juni 2004.
- Ka'bah, Rifyal. *Hukum Islam di Indonesia: Perspektif Muhammadiyah dan NU*. Jakarta: Universitas Yarsi, 1999.
- Keputusan No. II/MNU-32/III/2010 Pasal 18 Tentang Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama.
- Keputusan Bahtsul Masail Maudhu'iyah PWNU Jawa Timur Tentang Islam Nusantara, diselenggarakan bersama antara P2KB LP3 Universitas Negeri Malang, PWNU Jawa Timur dan PCNU Kota Malang, Malang 13 Februari 2016, diakses dari <https://aswajanucenterjatim.com/utama/keputusan-bahtsul-masail-maudhu'iyah-pwnu-jawa-timur-tentang-islam-nusantara/>.
- Lubab, Nafiul dan Novita Pancaningrum. "Mazhab: Keterkungkungan Intelektual atau Kerangka Metodologis (Dinamika Hukum Islam)", *Yustisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 6, No. 2, Desember 2015.
- Mahfudh, MA. Sahal. *Nuansa Fiqih Sosial*. Yogyakarta: LKiS, 1994.
- , *Bahtsul Masail dan Istimbath Hukum NU*. t.t.: t.tp., t.th.
- Maimun. "Akomodasi Budaya Lokal dalam Fatwa-Fatwa Nahdlatul Ulama", *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 1, 2016.
- Mahsun. *Madhhab NU Mazhab Kritis: Bermadhab secara Manbaji dan Implementasinya dalam Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama*. Depok: Nadi Pustaka, 2015.
- Masyhuri, Abdul Aziz. *Anla: Majalah Nahdlatul Ulama*, Vol. 11, No. 2, Maret 1989.
- Mawardi, Ahmad Imam. "Sisi Positif Taqlid dalam Perkembangan Hukum Islam", *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5, No. 2, Maret 2011.
- Mughits, Abdul. *Kritik Nalar Fikih Pesantren*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Mumazzizq Z, Rizal. "Peta Pemikiran Fiqh di Kalangan Pesantren", *Al-Ahwal: Jurnal Kajian Hukum Keluarga dan Kajian Keislaman*, Vol. 7, No. 1, April 2015.
- Nasih, Ahmad Munjin. "Bahtsul Masail dan Problematikanya di Kalangan Masyarakat Muslim Tradisional", *al-Qānūn: Jurnal Pembaruan dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 12, No. 1, Juni 2009.

- Nu.or.id. “Jelang Mukhtar ke-33 NU: Apa yang dimaksud dengan Islam Nusantara?”, <http://www.nu.or.id/post/read/59035/apa-yang-dimaksud-dengan-islam-nusantara>, 22 April 2015,
- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. *Hasil-Hasil Mukhtar Ke-32 Nahdlatul Ulama*. Jakarta: Setjen PBNU, 2011.
- Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur. *NU Menjawab Problematika Umat Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur*. Surabaya: LBM NU Jawa Timur dan Khalista, 2015.
- Peters, Rudolph. “Idjtihad and Taqlid in 18th and 19th Century Islam”, *Die Welt des Islams*, Vol. 20, No. ¾, 1980.
- Rahmat, M. Imdadun (ed.). *Kritik Nalar Fiqih NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masail*. Jakarta: Lakpesdam, 2002.
- Riza, Achmad Kemal. “Contemporary Fatawa of Nahdlatul Ulama: Between observing the Maddhhab and Adapting the Context”, *Journal of Indonesia Islam*, Vol. 5, No. 1, Juni 2011.
- Sururi, Vivian Baharu. “Metode Istibat Hukum di Lembaga Bahtsul Masail NU”, *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 6, No. 3, 2013.
- Tim Penyelaras LTN NU (ed.), *Abkām al-Fuqahā’: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam (Keputusan Mukhtar, Munas dan Konber Nahdlatul Ulama 1926-2010)*. Surabaya: Khalista dan LTN PBNU, 2011.
- Van Bruinessen, Martin. *NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 1994.
- Yahya, Imam. *Pergeseran Ijtihad dalam Bahtsul Masail NU*. Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Zahro, Ahmad. *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999*. Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Zulian, Pradana Boy. *Fatwa in Indonesia: An Analysis of Dominant Legal Ideas and Mode of Thought of Fatwa-Making Agencies and Their Implications in the Post-New Order Period*. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2018.